

# Hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

Widiyatul Fadhila<sup>1</sup>, Helga faocha aztya<sup>2</sup>, Julia Rahmawati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: Widyafadhilao@gmail.com

## Kata Kunci:

Pancasila, kedaulatan rakyat, demokrasi pancasila, UUD 1945, partisipasi publik

## Keywords:

Pancasila, sovereignty of the people, pancasila democracy, 1945 constitution, public participation

## ABSTRAK

Sebagai sistem pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Demokrasi Indonesia memiliki hakikat yang mendalam dan kompleks. Pentingnya demokrasi terletak pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila, yang berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara tetapi juga sebagai sumber inspirasi untuk menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis. Setiap sila menunjukkan prinsip-prinsip dasar yang harus diterapkan dalam proses politik dan sosial. UUD 1945 memberikan kerangka hukum untuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia dan mengatur

instrumennya. Salah satu metode penting yang memungkinkan warga negara untuk memilih pemimpin mereka secara langsung adalah pemilihan umum, atau pemilu. Diselenggarakan secara berkala dan diawasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan keadilan dan transparansi. Selain itu, lembaga legislatif, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), bertindak sebagai perwakilan rakyat dan bertanggung jawab atas pembuatan undang-undang dan pengawasan kebijakan pemerintah. Dinamika politik, seperti partisipasi masyarakat dalam proses politik, menunjukkan praktik demokrasi Indonesia. Masyarakat semakin aktif menyuarakan pendapat mereka melalui berbagai saluran, termasuk forum publik, organisasi masyarakat sipil, dan media sosial. Meskipun partisipasi politik telah menghalangi demokrasi ideal. Singkatnya, hakikat, instrumentasi, dan praktik demokrasi Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Untuk mencapai demokrasi yang berkualitas tinggi dan berkelanjutan, seluruh bangsa harus berkomitmen untuk terus mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara

## ABSTRACT

Indonesian democracy is a comprehensive and intricate form of government that is founded on Pancasila and the 1945 Constitution (UUD 1945). The values found in Pancasila, which act as a framework for national and state affairs, are what make democracy so important. In addition to providing the foundation for the state, Pancasila also acts as an inspiration for setting up a democratic administration. Every precept outlines the fundamental ideas that ought to guide social and political activities. The 1945 Constitution establishes the legal foundation for Indonesia's democratic process and governs its tools. The general election, or pemilu, is a significant mechanism that enables people to choose their leaders directly. To maintain impartiality and openness, they are supervised by the General Election Commission (KPU) and held on a regular basis. Furthermore, as representatives of the people, legislative bodies such as the House of Representatives (DPR) and the Regional Representatives Council (DPD) are in charge of enacting laws and monitoring governmental policy. Indonesia's democratic practices are exemplified by political dynamics, such as public participation in the political process. Through a variety of platforms,



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

including as social media, civil society organizations, and public forums, people are becoming more engaged in expressing their thoughts. Despite this, more people are participating in politics. Ideal democracy is still thwarted by corruption, power abuse, and unequal access to knowledge and information. Briefly said, Pancasila and the 1945 Constitution serve as the foundation for the character, tools, and practices of Indonesian democracy. The entire nation must pledge to consistently actualize Pancasila values in all facets of national life in order to establish a high-quality and long-lasting democracy.

---

## **Pendahuluan**

Demokrasi memiliki posisi yang fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di Indonesia yang ditandai oleh keberagaman suku, agama, dan budaya. Sejak kemerdekaan, Indonesia menegaskan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi yang menjadi landasan hukum sekaligus pedoman dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi (Mau & Ditisrama, 2024). Kedua instrumen tersebut memuat nilai-nilai yang menuntut penyelenggaraan pemerintahan yang berkeadilan, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai hakikat demokrasi, mekanisme pelaksanaannya, serta praktiknya dalam kehidupan publik menjadi krusial agar demokrasi yang dijalankan tetap selaras dengan nilai-nilai bangsa (Faslah, 2025).

Dalam perspektif Pancasila, demokrasi tidak semata-mata dimaknai sebagai prosedur elektoral, melainkan sebagai sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai subjek utama dalam proses pengambilan keputusan. Nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, serta musyawarah untuk mufakat menjadi fondasi etis yang membedakan demokrasi Indonesia dari model demokrasi liberal murni. Dengan demikian, demokrasi Pancasila menekankan keseimbangan antara partisipasi rakyat, tanggung jawab moral, dan orientasi pada kesejahteraan Bersama (Faslah, 2025).

Di Indonesia, instrumentasi demokrasi terdiri dari berbagai lembaga dan mekanisme yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Kekuasaan terbagi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selain itu, salah satu alat penting dalam demokrasi adalah pemilihan umum yang digunakan untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin. Selain itu, pentingnya pendidikan politik dan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara tidak dapat diabaikan, karena hal ini meningkatkan kualitas demokrasi (Jannah & Lubis, 2025). Di Indonesia, praktik demokrasi menghadapi banyak tantangan, seperti politik identitas, korupsi dan transparansi akses informasi. Meskipun kebebasan dan berorganisasi berpendapat telah meningkat, masalah ini sering kali mengancam demokrasi. Oleh karena itu, perlu ada upaya bersama dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk pemerintah, untuk meningkatkan pelaksanaan demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Diharapkan bahwa makalah ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hakikat, instrumentasi, dan praktik demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

## Pembahasan

### Hakikat Demokrasi di Indonesia

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *cratos* yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Oleh karena itu secara etimologis *demoscratos* berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat (Suarlin & Fatmawati, 2022). Dengan kata lain, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Demokrasi adalah ide atau cara hidup yang mengutamakan hak dan kewajiban yang sama bagi seluruh warga negara.

Demokrasi dijelaskan sebagai bentuk pemerintahan yang berlandaskan prinsip bahwa seluruh masyarakat dewasa memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih. Selain itu demokrasi juga mengacu pada sistem pemerintahan yang mendorong serta memberikan hak-hak kewarganegaraan, seperti kebebasan berbicara, beragama, berpendapat, dan berasosiasi. Seiring dengan perkembangan zaman konsep demokrasi terus mengalami adaptasi dan penyesuaian sesuai dengan konteks sosial, politik, dan budaya di berbagai negara. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi bukanlah sistem yang statis, melainkan dinamis dan terus berkembang demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan inklusif bagi seluruh warga negara. Berikut pengertian demokrasi menurut para ahli:

1. Menurut (Hook, 1938), Demokrasi adalah jenis pemerintahan dimana keputusan pemerintahan yang penting dibuat secara langsung atau tidak langsung berdasarkan kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas oleh rakyat dewasa.
2. Menurut (Schneider & Schmitter, 2004), Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dimana orang-orang memilih dan bekerja sama dengan para wakil yang terpilih untuk mengendalikan pemerintah di wilayah publik.
3. (Mayo, 1962) menyatakan demokrasi sebagai sistem politik adalah suatu sistem dimana kebijakan umum yang ditentukan oleh mayoritas oleh wakil-wakil yang menyebarluaskan secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan pada prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam lingkungan yang menjamin kebebasan politik.

Demokrasi mengharuskan semua warga negara untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik dan memiliki kesempatan yang sama. Hal ini mencakup hak untuk menyuarakan pendapat tanpa rasa takut, bekerja sama dengan perwakilan, dan memilih dan dipilih. Keputusan harus dibuat sesuai dengan keinginan mayoritas, dan pemerintah bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan di lingkungan masyarakat. Jadi, demokrasi adalah sistem yang menjamin kebebasan individu, akuntabilitas pemerintah, dan kedaulatan rakyat.

Demokrasi Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bukan hanya sebuah sistem pemerintahan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang berakar dalam identitas bangsa. Identitas bangsa Indonesia yang kaya akan

nilai - nilai luhur dibentuk oleh demokrasi pancasila. Masyarakat Indonesia memiliki kemampuan untuk menciptakan tatanan sosial yang harmonis dan inklusif dengan memasukkan nilai - nilai pancasila ke dalam praktik demokrasi. Hal ini juga membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya budaya gotong royong, toleransi, dan kerja sama sebagai bagian dari bangsa. Demokrasi Pancasila memiliki prinsip-prinsip dasar yang membedakannya dari sistem demokrasi lainnya. Beberapa prinsip utama dalam demokrasi Indonesia adalah kedaulatan rakyat, negara hukum, keseimbangan hak dan kewajiban, musyawarah dan mufakat, keadilan sosial.

Hakikat demokrasi di Indonesia adalah yang berperan sebagai pondasi moral dan filosofis bagi negara, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai dasar negara menjadi akar yang kokoh bagi demokrasi di Indonesia. Jadi hakikat demokrasi di Indonesia adalah Pancasila. Pancasila bukan hanya dasar negara tetapi juga fondasi moral dan filosofi yang memberi jalan dan tujuan bagi sistem demokrasi negara ini (Adityo, 2022). Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat lebih dari sekedar sebuah ideologi politik. Dengan demikian, Pancasila yang bukan sekedar ideologi menjadi panduan utama dalam sistem pemerintahan dan kehidupan masyarakat, memberikan arah dan moral dan filosofis bagi bangsa. Demokrasi Indonesia dibangun di atas landasan Pancasila yang kuat dan membimbing sistem pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.

### **Instrumentasi Demokrasi Indonesia**

Instrumentasi Demokrasi Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 Demokrasi di Indonesia berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar konstitusional dalam menjalankan pemerintahan. UUD 1945 memberikan kerangka hukum yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945 (Pasal 1 ayat 2) untuk mewujudkan prinsip tersebut terdapat berbagai instrumentasi yaitu mekanisme, lembaga, dari sistem yang mendukung pelaksanaan demokrasi. Jadi, rakyat memiliki kemampuan untuk mengendalikan kedaulatan, dengan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan pers, UUD 1945 menyediakan kerangka hukum untuk pelaksanaan melalui berbagai instrumen, seperti sistem pemilu, lembaga negara seperti DPR dan KPU, dan perlindungan hak asasi manusia. Tantangan seperti korupsi dan ketidaksetaraan masih menjadi perhatian, namun upaya terus dilakukan untuk memperkuat sistem demokrasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab untuk memperhatikan fondasi demokrasi. Prinsip ini menegaskan

Kedaulatan rakyat adalah prinsip utama sistem demokrasi UUD 1945, yang menetapkan bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan. Kebijakan dan keputusan politik negara harus mengutamakan kepentingan rakyat selain mewakili keinginan mereka. Pemilihan umum yang diselenggarakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil adalah contoh nyata dari kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia. Selain prinsip kedaulatan rakyat, UUD 1945 juga menegaskan prinsip negara hukum, yang memastikan bahwa setiap tindakan pemerintahan dilakukan sesuai dengan hukum dan tidak sewenang-wenang. Prinsip ini memastikan bahwa kebijakan dan keputusan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang berlaku

dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia atau prinsip-prinsip demokrasi (Mau & Ditisrama, 2024). Oleh karena itu, negara hukum menegaskan bahwa tidak ada pihak, termasuk pemerintah yang lebih tinggi dari hukum.

UUD 1945 membagi kekuasaan negara ke dalam beberapa lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan masing-masing untuk menghindari penyalahgunaannya. Prinsip pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan adalah dasar pembagian ini (Mau & Ditisrama, 2024). Sistem ini dirancang untuk menciptakan mekanisme pengawasan dan dapat mempertahankan keseimbangan dalam pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, ada tiga cabang utama kekuasaan yaitu eksekutif, yudikatif dan legislatif. Sistem kontrol dan keseimbangan diharapkan dapat mencegah satu pihak mengumpulkan semua kekuasaan. Selain itu, mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang dibuat tetap sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan memihak kepada kepentingan rakyat. Demokrasi dalam UUD 1945 diwujudkan melalui berbagai instrumen yang memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi secara efektif dalam sistem pemerintahan Indonesia. Instrumen tersebut terbagi ke dalam dua aspek utama, yaitu mekanisme demokrasi dan lembaga demokrasi.

### **Mekanisme Demokrasi**

#### ***Pemilihan Umum (Pemilu)***

Pemilihan umum merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi mengamanatkan bahwa pemilu harus diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL) sebagai mekanisme konstitusional untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin eksekutif secara periodik. Melalui pemilu, rakyat memiliki ruang partisipasi politik yang sah untuk menentukan arah pemerintahan serta kebijakan negara. Oleh karena itu, setiap desain sistem pemilu harus tetap berpijak pada prinsip-prinsip konstitusional agar tidak mengurangi esensi kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 (Supriyadi, 2023).

#### ***Kebebasan Berpendapat***

Demokrasi tidak dapat berfungsi tanpa kebebasan berbicara. Hak warga negara untuk menyampaikan pendapat, berserikat, dan berkumpul sebagai cara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi dijamin dalam UU 1945. Hak ini memungkinkan masyarakat untuk mengkritik dan berkomentar tentang kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan (Wahyuni & Desiandri, 2024).

#### ***Sistem Check and Balances***

Sistem Pengawasan dan keseimbangan UUD 1945 menetapkan sistem pengawasan dan keseimbangan di antara lembaga negara untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Metode ini memastikan bahwa setiap cabang pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif mampu mengawasi dan mengoreksi satu sama lain.

### **Partisipasi Publik dalam Kebijakan**

Masyarakat harus terlibat secara aktif dalam pengambilan kebijakan. Deklarasi 1945 mendorong partisipasi publik melalui berbagai cara seperti musyawarah, diskusi publik, petisi, dan partisipasi dalam pembuatan undang-undang yang memengaruhi kehidupan sehari-hari orang (Riskiyono, 2022).

### **Lembaga Demokrasi**

- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yaitu MPR sebagai lembaga tertinggi negara sebelum amandemen, saat ini MPR berfungsi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dengan kewenangan mengubah dan menetapkan UUD serta melantik Presiden dan Wakil Presiden.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yaitu DPR memiliki peran sentral dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap pemerintahan. DPR mewakili kepentingan rakyat dalam penyusunan undang-undang dan memastikan jalannya pemerintahan sesuai dengan prinsip demokrasi.
- c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yaitu DPD mewakili kepentingan daerah dalam proses legislasi di tingkat nasional. Lembaga ini memastikan bahwa kepentingan daerah turut diperhitungkan dalam kebijakan nasional.
- d. Presiden dan Wakil Presiden yaitu Sebagai pemimpin eksekutif yang dipilih langsung oleh rakyat, Presiden dan Wakil Presiden bertanggung jawab menjalankan pemerintahan serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan negara sesuai dengan amanat konstitusi.
- e. Mahkamah Konstitusi (MK) yaitu Menyelesaikan penetapan kewenangan antar lembaga negara, dan menyelesaikan pembubaran partai politik dan pelanggaran hasil pemilu, MK bertanggung jawab untuk menjaga konstitusi.
- f. Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu KPU merupakan lembaga independen yang bertugas menyelenggarakan pemilu secara jujur dan adil. Keberadaan KPU memastikan bahwa pemilu berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi yang transparan dan akuntabel.

### **Praxis demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945**

Demokrasi praxis adalah penerapan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari orang. Hak untuk berbicara didepan umum adalah beberapa contoh praktik demokrasi di Indonesia. Masyarakat yang terlibat dalam aktivitas demokrasi akan memperkuat fondasi demokrasi secara keseluruhan dan menjaga sistem Demokrasi Indonesia berfungsi. Indonesia bukan hanya sistem pemerintahan tetapi juga menjadi cermin dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sumber utama demokrasi Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945 yang berfungsi sebagai dasar untuk menciptakan karakter demokrasi unik yang sesuai dengan jati diri bangsa. Praxis adalah penerapan demokrasi dalam kehidupan nasional dan internasional (Sutrisno, 2025). Demokrasi di Indonesia berarti lebih dari hanya kebebasan untuk memilih dan sistem yang melindungi keadilan,

persatuan, dan musyawarah. Demokrasi Indonesia harus mencerminkan budaya bangsa dengan mengutamakan solidaritas dan keseimbangan hak dan kewajiban warga negara.

Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila mengandung gagasan demokrasi yang luar biasa, dan sistem demokrasi yang didasarkan pada nilai – nilai pancasila yang berfungsi sebagai dasar Republik Indonesia (Shobirin, 2025). Setiap sila pancasila memainkan peran yang signifikan dalam menentukan sifat demokrasi nasional:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa yaitu Sila ini mendasari demokrasi dengan normal dan etika agama, demokrasi tidak hanya tentang kebebasan, tetapi juga tentang tanggung jawab moral kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab yaitu Sila ini menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam demokrasi, setiap orang harus diperlakukan secara adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia yaitu Sila ini menekankan bahwa persatuan dan kesatuan sangat penting dalam masyarakat yang beragama, dan demokrasi harus mampu menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa. Demokrasi tidak boleh memecah bela bangsa, tetapi sebaliknya harus memperkuat persatuan.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan atau Perwakilan Dalam sistem demokrasi, musyawarah di utamakan dalam pengambilan keputusan dan kepentingan bersama dipertimbangkan saat mengambil keputusan.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia yaitu Tujuan utama demokrasi Pancasila adalah untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial bagi semua warga negara.

UUD 1945 adalah landasan konstitusional Indonesia yang menjamin kedaulatan rakyat melalui pasal 1 dan 2, melindungi hak asasi manusia melalui pasal 28A-28J, mengatur sistem pemerintahan demokratis melalui pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta memastikan pemilu yang demokratis sebagai sarana memilih pemimpin yang sah melalui pasal 22E. Dengan demikian UUD 1945 memastikan demokrasi Indonesia berjalan berdasarkan hukum, menghormati hak warga negara, serta menjamin transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Implementasi Demokrasi dalam kehidupan Nasional dan Internasional tidak hanya sistem politik Indonesia yang menunjukkan demokrasi, tetapi juga aspek kehidupan masyarakat (Hanisa & Firdaus, 2023). Indonesia adalah negara demokrasi yang menerapkan nilai-nilai dibergbagai bidang termasuk politik, sosial, ekonomi, dan hukum. Dalam bidang politik, demokrasi diterapkan melalui pemilihan umum yang bebas dan adil, kebebasan berpendapat, dan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Demokrasi hadir dalam bidang sosial melalui kebebasan masyarakat untuk berorganisasi, kesetaraan hak bagi seluruh warga negara, dan kehidupan yang harmonis di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya. Demokrasi juga berdampak pada bidang ekonomi, di mana keadilan dan kesejahteraan terus diterapkan untuk memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Di bidang hukum, demokrasi menuntut supremasi hukum. Demokrasi harus menjadi bagian dari

kehidupan sehari-hari masyarakat bukan hanya sistem pemerintahan. Sehingga demokrasi tidak hanya menjadi gagasan teoritis tetapi juga diterapkan dalam kehidupan nyata, nilai-nilai demokrasi seperti keadilan, kebersamaan, dan persatuan harus diterapkan dalam interaksi sosial (Adityo, 2022).

Meskipun demokrasi Indonesia telah berkembang, ada banyak masalah yang dapat menghambat kualitasnya. Politik uang, korupsi, dan partisipasi politik yang rendah adalah beberapa di antaranya. Fenomena ini dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, dan juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi itu sendiri. Untuk memperkuat demokrasi, semua orang harus bekerja sama. Pertama, orang harus lebih sadar politik dan berpartisipasi lebih aktif dalam proses demokrasi, seperti memilih dengan bijak dan mengawasi jalannya pemerintahan. Kedua, penegakan hukum harus diperkuat untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ketiga, pemerintah harus meningkatkan transparansi dan memungkinkan orang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

Saat ini kita masih melihat banyak masalah tentang lemahnya demokrasi negara kita. Beberapa masalah yang muncul di media sosial adalah:

1. Kinerja lembaga perwakilan dan partai politik yang buruk
2. Krisis partisipasi publik dalam politik
3. Munculnya penguasa di dalam demokrasi
4. Kedaulatan rakyat dicabut oleh demokrasi saat ini.

Dalam demokrasi munculnya “dinasti politik” yang mengontrol segala aspek kehidupan masyarakat, termasuk pemerintahan, lembaga perwakilan, bisnis, peradilan dan sebagainya, dimiliki oleh satu atau lebih keluarga atau kroni (Dedi, 2022). dalam hal demokrasi menghapus kedaulatan rakyat, bahwa setelah struktur kekuasaan “otokrasi” runtuh menunjukkan bahwa yang kita peroleh sebenarnya adalah oligarki, dimana sekelompok kecil elit memegang kekuasaan, sementara sebagian rakyat (demos) tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan, seperti wewenang, uang, hukum, informasi dan pendidikan dan sebagainya.

## **Kesimpulan dan Saran**

Belandaskan Pancasila dan UUD 1945, demokrasi Indonesia bukan hanya sebuah sistem pemerintahan tetapi juga mencerminkan nilai – nilai luhur bangsa. UUD 1954 memberikan kerangka hukum untuk pemerintahan dan sistem demokrasi, termasuk pemilihan pemimpin dan wakil rakyat. Kebebasan pers, hak asasi manusia, dan sistem peradilan independen mendukung demokrasi, sementara lembaga negara seperti KPU dan Bawaslu menjaga integritas pemilu. Pemilihan umum reguler dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan menunjukkan praktik demokrasi, ham dan media massa sangat penting dalam menjaga akuntabilitas pemerintahan dan mendorong perubahan yang baik. Demokrasi pancasila adalah demokrasi konstitusional yang di dasarkan pada kedaulatan rakyat dalam menjalankan pemerintahan dan negara. Demokrasi pancasila menekankan pentingnya menghormati martabat dan hak asasi

setiap orang, menjunjung tinggi keadilan sosial, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia, kedaulatan rakyat, dan kemanusiaan yang adil dan beradab.

## Daftar Pustaka

- Adityo, R. D. (2022). Penguatan dasar negara melalui penyuluhan Pancasila pada mahasiswa. *Devosi*, 3(2), 1–5. <https://repository.uin-malang.ac.id/11455/>
- Dedi, A. (2022). Politik Dinasti Dalam Perspektif Demokrasi. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 92–101.
- Faslah, R. (2025). *Pancasila sebagai dasar negara dan panduan hidup berbangsa*. UIN Malang Press. <https://repository.uin-malang.ac.id/24376/>
- Hanisa, I., & Firdaus, S. U. (2023). Dinamika demokrasi dalam kebijakan publik: Tantangan dan peluang bagi sistem hukum Indonesia. *Sovereignty*, 2(4), 340–353.
- Hook, S. (1938). Democracy as a Way of Life. *The Southern Review*, 4, 45.
- Jannah, R., & Lubis, R. H. (2025). Hak dan Kewajiban Warga Negara. *Journal of Literature Review*, 1(1), 180–186.
- Mau, H. A., & Ditisrama, T. (2024). Teori Dan Hukum Konstitusi. AMU Press, 1–498.
- Mayo, H. B. (1962). How can we justify Democracy? *American Political Science Review*, 56(3), 555–566.
- Riskiyono, J. (2022). *Pengaruh partisipasi dan pengawasan publik dalam pembentukan undang-undang*. Publica Indonesia Utama.
- Schneider, C. Q., & Schmitter, P. C. (2004). Liberalization, transition and consolidation: Measuring the components of democratization. *Democratization*, 11(5), 59–90.
- Shobirin, M. I. (2025). Evolusi demokrasi Pancasila. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(11).
- Suarlin, S., & Fatmawati, F. (2022). *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*. Penerbit Widina.
- Supriyadi, A. P. (2023). *Sistem Pemilu Tertutup Mencederai Konstitusi*. <http://repository.uin-malang.ac.id/14907/>
- Sutrisno, A. (2025). Penerapan Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Tantangan Teoritis dan Praktis. *Iblam Law Review*, 5(2), 78–90.
- Wahyuni, R., & Desiandri, Y. S. (2024). Hak Asasi Manusia (HAM) Pada Kebebasan Berpendapat/Bereksperesi dalam Negara Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 5(3), 961–966.